

Katalog BPS : 9302002.11

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh

Triwulan III - 2015

Tahun Dasar 2010



<http://aceh.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

MENURUT PENGELUARAN PROVINSI ACEH

TRIWULAN III TAHUN 2015

TAHUN DASAR 2010

<http://aceh.bps.go.id>

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

MENURUT PENGELUARAN PROVINSI ACEH

TRIWULAN III TAHUN 2015

Katalog BPS : 9302002.11
Nomor Publikasi : 11552.1506
Ukuran Buku : 21 x 14,8 cm
Jumlah Halaman : ii + 31 Halaman

Penanggung Jawab/Pengarah : Hermanto
Editor : Andariati Afrida, Haifa Sari
Penulis : Opan Fauzan Hamdan
Pengolah Data & Grafik : Opan Fauzan Hamdan
Penyunting dan Finalisasi : Haifa Sari
Cover : Opan Fauzan Hamdan

Diterbitkan Oleh :

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk melihat gambaran kinerja perekonomian secara makro suatu wilayah dalam periode tertentu.

Untuk itu, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh menerbitkan Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2015 dalam rangka mendiseminasikan kajian tentang gambaran kinerja perekonomian secara lebih dini dan lengkap pada periode tersebut. Mulai triwulan IV tahun 2014, penghitungan PDRB telah menggunakan tahun dasar baru 2010 berbasis SNA 2008, dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000. Perubahan tahun dasar ini perlu dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan regional.

Perlu disampaikan bahwa angka-angka yang terdapat pada publikasi ini masih bersifat angka sementara dan akan dilakukan perbaikan pada triwulan berikutnya.

Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Banda Aceh, November 2015
Kepala BPS Provinsi Aceh

Hermanto

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan tersedianya data PDRB, strategi dan kebijaksanaan pembangunan perekonomian yang telah diambil pemerintah dapat dievaluasi, dan diperbaiki atau dilanjutkan di masa mendatang.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
- b. Perluasan kesempatan kerja.
- c. Pemerataan pembagian pendapatan masyarakat.
- d. Peningkatan hubungan ekonomi regional.

e. Pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier

Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik dengan distribusi yang semakin merata.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional/daerah khususnya di bidang ekonomi.

Sementara itu dalam beberapa buku referensi ditegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor permintaan daripada penyediaan. Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian masyarakat modern telah mendorong produsen untuk meningkatkan

produknya baik secara kuantitas maupun kualitas, yang pada akhirnya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dibutuhkan parameter untuk memantau perkembangan permintaan atau konsumsi masyarakat luas yaitu dengan melihat perkembangan nilai PDRB menurut Pengeluaran.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDB/PDRB Berbasis SNA 2008

Penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mulai triwulan IV tahun 2014 akan menggunakan tahun dasar baru 2010 berbasis SNA 2008, dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000. Perubahan tahun dasar ini perlu dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional

dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Account* (SNA 2008) melalui penyusunan *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB ini dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Adapun tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut :

- a. Rekomendasi PBB dalam SNA1993 (*part* 16;76), bahwa pergantian tahun dasar penghitungan PDB dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun agar dapat memberikan gambaran perkembangan

- ekonomi sesuai dengan kondisi terkini.
- b. Teridentifikasi pembaharuan konsep, sumber data dan metodologi berbasis SNA 2008 yang akan diimplementasikan dalam penyusunan PDB tahun dasar 2010.
 - c. Pada tahun 2010, perekonomian Indonesia dipandang relatif stabil dengan laju pertumbuhan PDB mencapai 6,10 persen dan tingkat inflasi mencapai 6,96 persen. Meskipun pada tahun 2009 perekonomian Indonesia terimbas krisis finansial global.
 - d. Perubahan struktur ekonomi nasional dari tahun 2000 dan 2010 dipandang cukup signifikan akibat perubahan dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru.
 - e. Tersedianya Tabel Penyediaan dan Penggunaan (TPP) Indonesia 2010 yang menggambarkan keseimbangan transaksi *supply* dan *use* atas berbagai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu industri. TPP akan dihasilkan data PDB yang konsisten menurut 3 (tiga) pendekatan yaitu PDB menurut lapangan usaha, penggunaan dan pendapatan.
 - f. Tersedianya neraca produksi menurut sektor institusi selain neraca produksi menurut lapangan usaha yang diturunkan dari *Full Sequence of Account* (FSA) 2010.
 - g. Tersedianya koresponden/konversi klasifikasi antara klasifikasi menurut lapangan usaha (KBLI2009) dengan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI2010) dan antara Kode *Harmonized System* (HS) dengan KBLI2009 untuk menyusun TPP Indonesia 2010.
 - h. Tersedianya deflator baru untuk penghitungan PDB yaitu Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index /PPI*).
 - i. Tersedianya hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) yang dapat digunakan sebagai

basis analisis, seperti data jumlah penduduk dan ketenagakerjaan.

1.3 Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA2008)

System of National Accounts 2008 (SNA 2008) atau Sistem Neraca Nasional 2008 adalah standar rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud terkait dengan penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca berstandar internasional. Dalam sejarahnya, SNA2008 merupakan versi yang kelima, dimana versi sebelumnya adalah SNA 1947, SNA 1953, SNA 1968, dan SNA 1993.

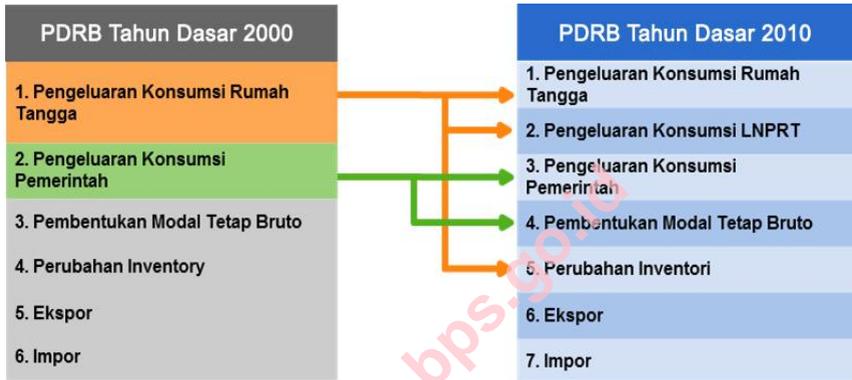
SNA merupakan sebuah alat utama untuk mengevaluasi, menganalisis, dan meramal fenomena ekonomi suatu negara, yaitu produksi, konsumsi, akumulasi, pendapatan, dan kekayaan. Dengan menggunakan informasi dari SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan

dimengerti. Selain itu, SNA juga digunakan untuk mengkoordinasikan *framework* untuk seluruh statistik lainnya (*central statistical framework*) sehingga diperoleh definisi dan data yang konsisten.

SNA telah digunakan untuk laporan internasional tentang data neraca nasional yang telah sesuai dengan standar, konsep, definisi, dan klasifikasi yang diterima secara internasional (*international comparisons*).

Gambar 1.

Perbandingan klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran



1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi, termasuk barang/ jasa yang dibarter, diterima dalam bentuk natural, atau diproduksi sendiri. Barang dan jasa yang dimaksud antara lain:

1. Segala jenis bahan makanan dan minuman baik mentah maupun bahan jadi, termasuk minuman beralkohol, tembakau dan rokok

2. Perumahan berikut fasilitas perumahan seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telpon, listrik dan air. Termasuk juga pengeluaran untuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*). Sedangkan pembelian rumah tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga
3. Segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki dan tutup kepala
4. Barang tahan lama seperti mobil, motor, kulkas, meubel, TV, alat-alat dapur, mainan anak, alat-alat

olahraga, binatang peliharaan, dan barang tahan lama lainnya

5. Barang lainnya seperti bahan-bahan untuk kebersihan (sabun mandi, sampo dan sejenisnya), bahan kecantikan (kosmetik, lulur, bedak, lipstik dan sejenisnya), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar, kertas pembersih dan sebagainya

Jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi dan sejenisnya), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus dan sejenisnya), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket bioskop, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga, tukang kebun, *baby sitter* dan jasa lainnya.

Pada tahun dasar baru 2010, konsumsi rumah tangga tidak termasuk pembelian dengan motif *store of value* (emas perhiasan, barang koleksi seperti lukisan, barang antik, dsj) , perbaikan kecil rumah tinggal, dan konsumsi LNPRT, karena konsumsi LNPRT sudah menjadi komponen tersendiri.

Untuk memperkirakan besarnya konsumsi rumah tangga, digunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data pokok.

Selanjutnya penyempurnaan estimasi dilakukan melalui proses rekonsiliasi.

Perkiraan besarnya konsumsi rumahtangga didasarkan pada data Susenas, penduduk pertengahan tahun, serta Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk perkiraan konsumsi pada tahun di mana data Susenas belum tersedia digunakan model elastisitas pendapatan terhadap perubahan permintaan barang-barang konsumsi.

1.4.2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT

Pengeluaran lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa dalam rangka melaksanakan aktivitas pelayanan. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh : PBB, STNK, BBN, dll.

Jenis lembaga yang termasuk LNPRT yaitu :

1. Organisasi kemasyarakatan (Ormas),
2. Organisasi sosial (Orsos),
3. Organisasi Profesi (Orprof),
4. Perkumpulan sosial/ kebudayaan/ olahraga/ hobi,
5. Lembaga swadaya masyarakat,
6. Lembaga keagamaan,
7. Organisasi bantuan kemanusiaan/ beasiswa.

Sedangkan kegiatan utama yang dilakukan oleh LNPRT berdasarkan tujuan utamanya dibedakan menjadi 9, yaitu :

1. Perumahan,
2. Kesehatan,
3. Rekreasi dan Kebudayaan,
4. Pendidikan,
5. Perlindungan/Jaminan sosial,
6. Keagamaan,

7. Partai politik, Organisasi buruh dan Organisasi profesi,
8. Lingkungan hidup,
9. Jasa-Jasa

1.4.3. Konsumsi Pemerintah

Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas produksi maupun aktivitas investasi. Untuk sektor pemerintah, besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan output pemerintah. Untuk itu PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, serta perkiraan penyusutan barang modal, dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan. Yang juga termasuk PK-P adalah *social transfer in kind purchased market production*. Definisi ini sejalan dengan definisi dalam SNA 1968, yang menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ekuivalen dengan nilai barang dan jasa yang

diproduksi oleh pemerintah untuk dikonsumsi sendiri.

Seluruh pengeluaran konsumsi pemerintah dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara, dalam PDRB series baru ini PK-P diklasifikasikan berdasarkan pengeluaran pemerintah kolektif dan individu.

1.4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal juga diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Barang yang tidak diproduksi kembali, seperti tanah dan cadangan mineral, tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Pembentukan modal tetap bruto mencakup:

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan atau konstruksi terdiri dari :
 - a. Bangunan tempat tinggal

- b. Bangunan bukan tempat tinggal
- c. Bangunan atau konstruksi lainnya seperti; jalan, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar TV, pelabuhan, terminal, jaringan pipa untuk minyak, gas dan air dan monument.
- d. Perbaikan besar-besaran dari bangunan tersebut di atas.

Pembentukan modal berupa bangunan/konstruksi dinilai sesuai dengan output bangunan yaitu nilai seluruh pekerjaan bangunan pada satu tahun tertentu tanpa memperhatikan bangunan tersebut sudah selesai atau belum.

2. Pembentukan modal tetap non bangunan berupa mesin dan alat perlengkapan terdiri dari :
 - a. Alat-alat transpor, seperti kapal laut, kapal terbang, kereta api, bus, truk, motor, dan lain lain,
 - b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian,
 - c. Mesin-mesin dan alat perlengkapan untuk industri, listrik dan pertambangan, mesin-mesin dan

alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jalan, jembatan dan lain-lain,

d. Mesin-mesin dan perabot untuk perlengkapan kantor, toko, hotel, restoran, rumah dan lain-lain.

Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang sedang dalam proses pembuatan tidak dimasukkan dalam perhitungan pembentukan modal tetap bruto, tetapi merupakan stok dari produsennya.

3. Budidaya sumber daya hayati.

4. Produk kekayaan intelektual meliputi : *Research and development*, eksplorasi dan evaluasi mineral, perangkat lunak komputer dan database, karya hiburan, tulisan, dan seni, produk kekayaan intelektual lainnya.

5. Sistem persenjataan.

6. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Yang dimaksud dengan tanaman keras adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih. Termasuk juga pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar selama perkebunan itu belum

mendatangkan hasil (berproduksi) dan kegiatan penanaman kembali (*reboisasi*) yang dilakukan oleh perusahaan pemerintah dan oleh pemerintah sendiri.

7. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susu dan bulunya atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.

8. Margin pedagang atau makelar, jasa pelayanan dan ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak pengusaha hutan, hak paten, hak cipta dan barang modal bekas tercakup dalam pembentukan modal tetap.

9. Barang modal lainnya.

1.4.5. Perubahan Inventori

Inventori merupakan persediaan barang pada unit institusi, yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, atau belum selesai diproduksi, atau belum selesai diproses, atau belum terjual. Sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan

tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Pada prinsipnya inventori merupakan persediaan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai input antara atau konsumsi akhir. Klasifikasi inventori menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi.
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau penyediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
- f. Ternak untuk tujuan dipotong.
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan.
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

1.4.6. Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri

Ekspor barang dan jasa luar negeri merupakan nilai transaksi pemindahan kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara residen suatu negara dengan non-residen (dalam harga f.o.b). Nilai ekspor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction dan direct purchase non-residen* di Indonesia. Sedangkan ekspor jasa mencakup dua belas sektor jasa

(BOP Manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan diantaranya adalah Statistik ekspor, Statistik Pariwisata, Statistik *Inbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

1.4.7 Impor Barang dan Jasa Luar Negeri

Impor barang luar negeri merupakan nilai transaksi ekonomi (pembelian, barter, *gifts/grants*) dalam bentuk barang antara non-residen dan residen suatu negara. Sedangkan impor jasa luar negeri merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk jasa antara non-residen dengan residen suatu negara. Impor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction, direct purchase*

penduduk Indonesia di luar negeri, impor sewa beli dan kawasan berikat nasional (KBN). Sedangkan untuk impor jasa luar negeri mencakup dua belas sektor jasa (BOP manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan terdiri dari Statistik impor, Statistik Pariwisata, Statistik *Outbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

1.4.8 Net Ekspor antar Daerah

Nilai net ekspor antar daerah merupakan selisih nilai ekspor dan impor antar daerah. Ekspor dan impor antar daerah merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara non-residen dengan residen suatu daerah.

II. TINJAUAN PDRB

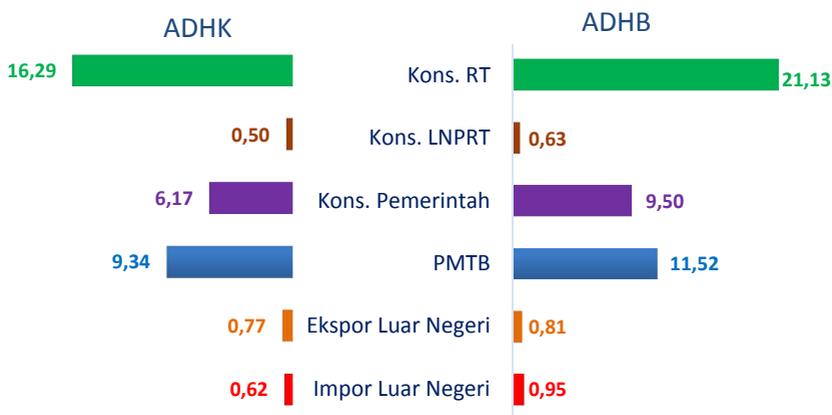
2.1 Nilai PDRB

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) Aceh di triwulan III 2015 masih menjadi komponen dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 21,13 triliun rupiah pada PDRB ADHB dan 16,29 triliun rupiah pada PDRB ADHK 2010. Komponen terbesar kedua dalam PDRB Pengeluaran adalah komponen PMTB dengan nilai ADHB sebesar 11,52 triliun rupiah dan ADHK 2010 sebesar 9,34 triliun rupiah. Selanjutnya pada komponen pengeluaran konsumsi

pemerintah (PKP), nilai PDRB ADHB sebesar 9,50 triliun rupiah dengan ADHK 2010 sebesar 6,17 triliun rupiah. Nilai ekspor luar negeri ADHB sebesar 0,81 triliun rupiah dengan ADHK 2010 sebesar 0,77 triliun rupiah. Komponen impor luar negeri Aceh sebesar 0,95 triliun rupiah dengan ADHK 2010 sebesar 0,62 triliun rupiah. Komponen konsumsi LNPRT merupakan komponen dengan nilai terkecil dalam PDRB Aceh yaitu sebesar 0,63 triliun rupiah pada ADHB dan 0,50 triliun rupiah pada ADHK 2010 (gambar 2).

Gambar 2.

Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran,
Triwulan II 2015 (triliun rupiah)



2.2 Pertumbuhan Ekonomi

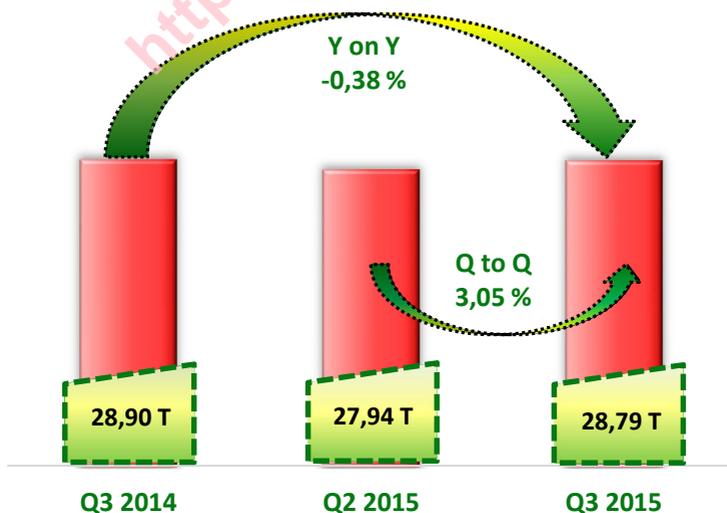
Tinjauan perkembangan PDRB secara triwulanan (*q-to-q*) menggambarkan pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III tahun 2015 dibandingkan triwulan II tahun 2015 berdasarkan ADHK 2010. Pertumbuhan ekonomi Aceh secara triwulanan terlihat cukup menggembirakan, dimana perekonomian Aceh triwulan III-2015 mampu tumbuh sebesar 3,05 persen

dengan nilai PDRB ADHK 2010 sebesar 28,79 triliun rupiah.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Aceh secara *year on year* (*y-on-y*) merupakan perbandingan PDRB ADHK 2010 pada triwulan III-2015 dengan triwulan III-2014. Berbeda dengan pertumbuhan *q-to-q*, pertumbuhan ekonomi Aceh secara *year on year* mengalami penurunan sebesar 0,38 persen (gambar 3).

Gambar 3.

Nilai PDRB ADHK 2010 dan Laju pertumbuhan *q-to-q* dan *y-on-y*



PDRB MENURUT PENGELUARAN

3.1 Laju Pertumbuhan *y-on-y* dan Distribusi PDRB

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan *y-on-y* yang menurun sebesar 0,38 persen sebagian besar dipengaruhi oleh komponen ekspor luar negeri yang tumbuh minus pada triwulan ini dibanding triwulan yang sama tahun 2014. Ekspor luar negeri Aceh turun cukup tinggi hingga mencapai 30,71 persen. Penurunan ekspor luar negeri tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekspor barang yang bernilai minus, sedangkan ekspor di bidang jasa masih tumbuh positif.

Penurunan ekspor barang tersebut sangat wajar mengingat pada triwulan III-2014, PT Arun NGL masih memiliki cadangan gas lebih banyak dibanding triwulan III-2015. Meskipun penurunan ekspor luar negeri cukup tinggi, komponen ini memiliki kontribusi yang kecil terhadap PDRB Aceh, yaitu sebesar 2,40 persen.

Selain menurunnya ekspor luar negeri, Impor luar negeri yang merupakan komponen pengurang dalam

PDRB juga mengalami pertumbuhan meskipun relatif kecil yaitu sebesar 2,40 persen dengan kontribusi sebesar 2,82 persen. Peningkatan impor luar negeri tersebut terjadi baik pada impor barang maupun jasa.

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) masih menjadi komponen utama dalam perekonomian Aceh dengan kontribusi sebesar 62,50 persen. Dibandingkan dengan triwulan III-2014, komponen ini tumbuh sebesar 3,41 persen. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada sub komponen makanan dan minuman, pakaian, serta rekreasi dan budaya.

Pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) juga mengalami pertumbuhan di triwulan III-2015 sebesar 1,68 persen dengan kontribusi sebesar 1,87 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kegiatan lembaga nonprofit di triwulan ini dibandingkan triwulan III-2014. Meskipun memiliki kontribusi yang relatif kecil dalam perekonomian, namun

LNPRT memiliki manfaat sosial yang cukup besar karena ikut membantu Pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah ketahanan rumah tangga.

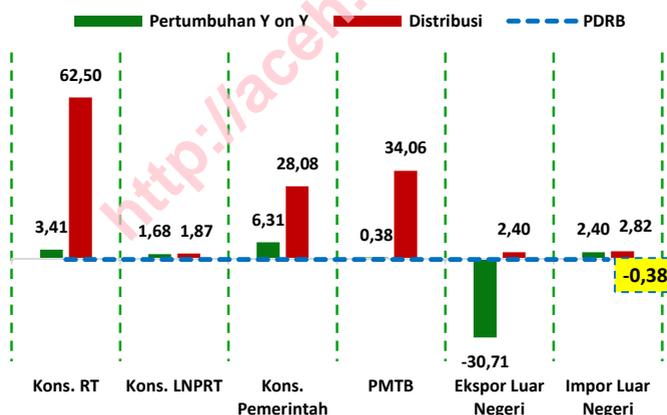
Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 0,38 persen dari triwulan III 2014. PMTB merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan besar terhadap

perekonomian Aceh, hal tersebut terlihat dengan nilai kontribusinya yang sebesar 34,06 persen.

Pertumbuhan yang cukup signifikan terlihat pada pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP), komponen ini tumbuh 6,31 persen dengan kontribusi terbesar ketiga di PDRB Aceh yaitu sebesar 28,08 persen (Gambar 4).

Gambar 4.

Laju Pertumbuhan y-on-y dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Triwulan III 2015 (persen)



3.2 Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Bila dilihat dari sumber penciptaan pertumbuhan ekonomi Aceh (y-on-y) triwulan III-2015, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah

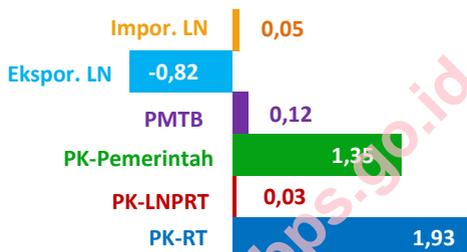
merupakan dua komponen dengan sumber pertumbuhan ekonomi paling tinggi yaitu sebesar 1,93 persen dan 1,35 persen. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga

dan pemerintah memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh secara *y-on-y*. Meskipun demikian,

kedua komponen tersebut belum mampu membuat pertumbuhan ekonomi Aceh menjadi positif (gambar 5).

Gambar 5.

Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Triwulan II 2015



3.3 Laju Pertumbuhan Kumulatif Triwulan III-2015 Terhadap Kumulatif Triwulan III-2014 (*c-to-c*)

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Aceh dari triwulan I hingga triwulan III 2015 masih turun sebesar 1,53 persen dibanding kumulatif triwulan I hingga triwulan III 2014. Penurunan pertumbuhan ekonomi secara kumulatif tersebut masih dipengaruhi oleh turunnya kegiatan ekspor luar negeri sebesar 54,54 persen, ditambah dengan turunnya PMTB dan konsumsi LNPRT yang masing-masing sebesar 0,80 dan 5,63 persen. Menurunnya kegiatan ekspor migas dari PT Arun NGL sejak triwulan

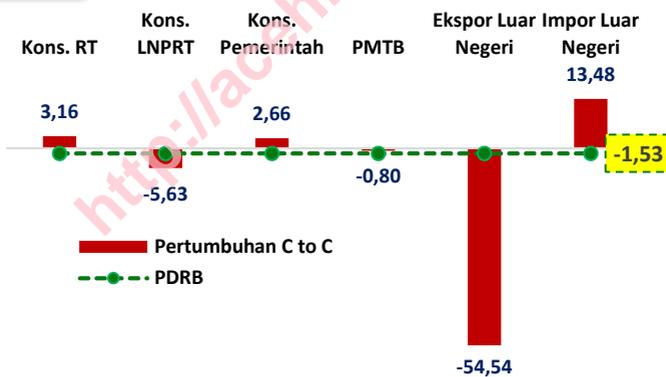
IV-2014 masih menjadi faktor utama penurunan nilai ekspor luar negeri Aceh. Sedangkan untuk komponen PMTB, pertumbuhan yang minus dipengaruhi oleh turunnya nilai PMTB non bangunan, sementara untuk PMTB bangunan masih tumbuh positif. Pada konsumsi LNPRT, meskipun kegiatan LNPRT sudah mulai berkembang, namun adanya pesta Pemilu di triwulan I hingga triwulan III 2014 mengakibatkan konsumsi LNPRT khususnya untuk Partai politik, Ormas politik dan Lembaga politik secara kumulatif di tiga triwulan tahun 2014 masih lebih tinggi dari tahun 2015.

Secara kumulatif, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah dari triwulan I hingga triwulan III 2015 tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 3,16 persen, hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk Aceh yang juga terus meningkat. Konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 2,66 persen, dimana pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan konsumsi

pemerintah secara individu. Kegiatan impor luar negeri Aceh justru menunjukkan hal yang kurang baik secara kumulatif selama tiga triwulan, dimana impor luar negeri naik sebesar 13,48 persen. Peningkatan impor ini terjadi pada impor barang luar negeri sedangkan untuk jasa luar negeri justru menurun. (gambar 6).

Gambar 6.

Laju Pertumbuhan PDRB *c-to-c* Menurut Pengeluaran, Triwulan III 2015 (persen)



3.3 Laju Pertumbuhan *q-to-q*

Pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan III-2015 jika dibandingkan dengan triwulan II-2015 (*q-to-q*) naik sebesar 3,05 persen. Ini menunjukkan secara triwulanan ekonomi Aceh tumbuh

lebih baik, dimana hampir seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif. Ekspor luar negeri merupakan komponen yang tumbuh signifikan yaitu sebesar 133,08 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh adanya kegiatan ekspor

barang berupa migas *Condensate* dan *Liquid Natural Gas* di bulan Agustus 2015, sehingga menaikkan nilai ekspor luar negeri di triwulan ini dibanding triwulan sebelumnya. Kenaikan kurs rupiah juga berpengaruh terhadap kenaikan nilai ekspor luar negeri Aceh secara triwulanan. Kegiatan impor luar negeri Aceh di triwulan III-2015 turun sebesar 2,02 persen dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan impor tersebut disebabkan oleh menurunnya impor barang luar negeri sebesar 7,76 persen.

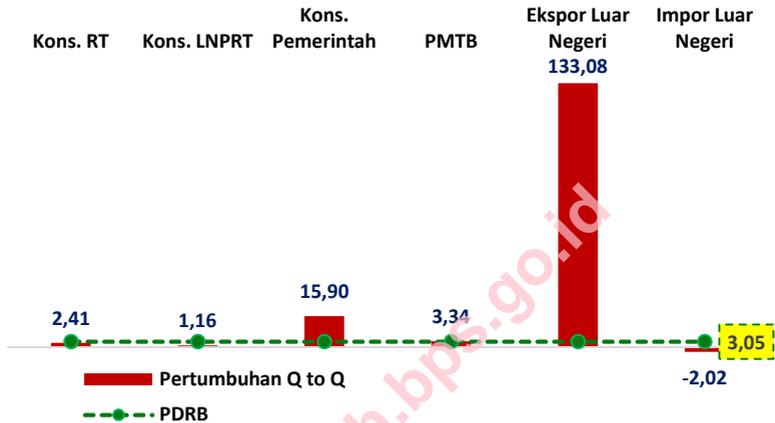
Adanya kegiatan meugang menyambut hari raya idul fitri dan idul adha, pemotongan kurban, haji, pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai negeri dan tahun ajaran baru di sekolah-sekolah ternyata mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 2,41 persen di triwulan III-2015. Disamping itu, banyaknya kegiatan keagamaan, santunan fakir miskin, bantuan sosial, bantuan pengungsi *Rohingya*, MTQ tingkat provinsi ke-32, serta peringatan HUT kemerdekaan RI ke-70 juga mampu

mendorong nilai konsumsi LNPRT hingga meningkat sebesar 1,16 persen dari triwulan sebelumnya.

Komponen PMTB dan pengeluaran konsumsi pemerintah di triwulan III-2015 juga meningkat masing-masing sebesar 3,34 persen dan 15,90 persen dari triwulan sebelumnya. Peningkatan PMTB tersebut terjadi baik pada PMTB bangunan maupun non bangunan. Beberapa indikasi peningkatan PMTB bangunan terlihat dari banyaknya pembangunan di beberapa daerah di Aceh, baik pembangunan masjid, pasar, hotel, taman, perkantoran maupun *shelter* bus. Peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah terjadi baik pada pengeluaran kolektif maupun individu. Adanya pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri juga turut meningkatkan konsumsi pemerintah di triwulan ini. Peningkatan konsumsi pemerintah tersebut juga menggambarkan bahwa pola realisasi anggaran pemerintah di triwulan III-2015 sudah lebih baik. (gambar 7).

Gambar 7.

Laju Pertumbuhan *q-to-q* Menurut Pengeluaran, Triwulan III 2015 (persen)



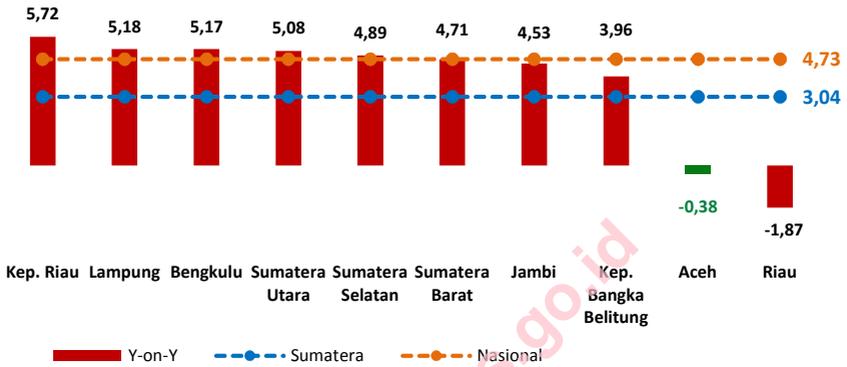
3.4 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi di wilayah regional Sumatera, secara *y-on-y* pertumbuhan ekonomi se Sumatera triwulan III-2015 tumbuh sebesar 3,04 persen. Pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 4,73 persen. Lima dari sepuluh (50 persen) provinsi di wilayah regional Sumatera pertumbuhannya sudah diatas

pertumbuhan ekonomi Nasional. Kepulauan Riau merupakan Provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan III-2015 dibandingkan dengan triwulan III-2014 yaitu sebesar 5,72 persen. Provinsi Aceh dan Riau merupakan provinsi yang justru mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di triwulan III-2015 secara *y-on-y*, yaitu masing masing sebesar minus 0,38 persen dan minus 1,87 persen (Gambar 8).

Gambar 8.

Pertumbuhan PDRB *y-on-y* se-Sumatera Triwulan III-2015

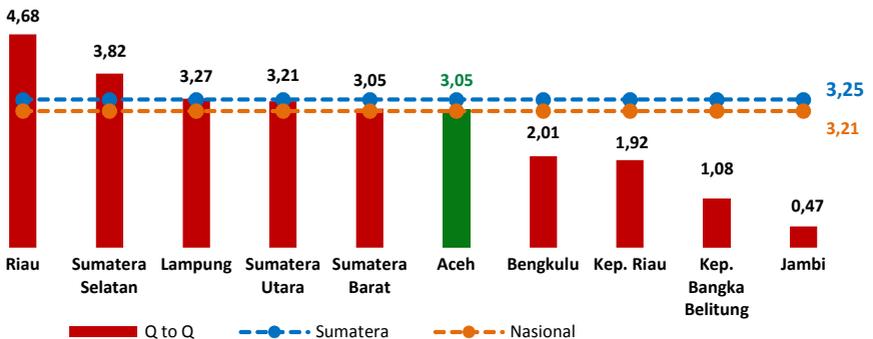


Jika dibandingkan dengan triwulan II-2015 (*q-to-q*), Pertumbuhan ekonomi Sumatera mampu tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu sebesar 3,25 persen. Riau masih menjadi Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera secara *q-to-q* yaitu sebesar

4,68 persen. Ekonomi Aceh tumbuh sebesar 3,05 persen dibandingkan triwulan sebelumnya dan menempati urutan ke-enam se-Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Aceh tersebut masih lebih tinggi dari Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jambi.

Gambar 9.

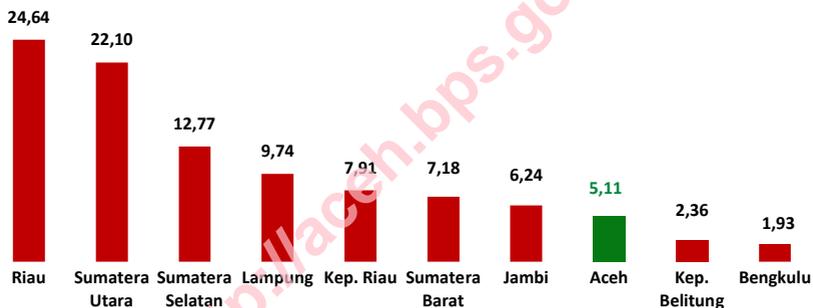
Pertumbuhan PDRB *q-to-q* se-Sumatera Triwulan III-2015



Jika ditinjau berdasarkan kontribusi dari PDRB masing-masing Provinsi di Sumatera terhadap PDRB Sumatera, Riau dan Sumatera Utara merupakan Provinsi dengan kontribusi tertinggi yaitu masing-masing sebesar

24,64 persen dan 22,10 persen. Kontribusi terkecil terhadap PDRB Sumatera adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 1,93 persen. PDRB Aceh sendiri memiliki kontribusi sebesar 5,11 persen terhadap PDRB Sumatera.

Gambar 10. Pertumbuhan PDRB *q-to-q* se-Sumatera Triwulan III-2015



Tabel 1.

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
(Triliun Rupiah)**

Komponen	2014		2015		
	III	IV	I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	19,65	20,12	20,22	20,40	21,13
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,57	0,62	0,61	0,62	0,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,57	11,59	6,83	7,99	9,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,04	11,26	10,94	11,04	11,52
5. Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ekspor Luar Negeri	1,71	1,84	0,61	0,45	0,81
7. Impor Luar Negeri	0,80	0,59	0,95	0,92	0,95
8. Net Ekspor Antar Daerah	-7,38	-12,14	-6,34	-6,85	-8,82
P D R B	33,36	32,69	31,91	32,72	33,81

Tabel 2.

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
(Triliun Rupiah)**

Komponen	2014		2015		
	III	IV	I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15,76	15,86	15,81	15,91	16,29
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,49	0,50	0,49	0,49	0,50
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,80	7,82	4,64	5,32	6,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,30	9,42	9,04	9,04	9,34
5. Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ekspor Luar Negeri	1,11	1,28	0,47	0,33	0,77
7. Impor Luar Negeri	0,60	0,40	0,65	0,63	0,62
8. Net Ekspor Antar Daerah	-2,95	-6,16	-2,31	-2,52	-3,65
P D R B	28,90	28,32	27,48	27,94	28,79

Tabel 3.

Laju Pertumbuhan *y-on-y* PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	2014		2015		
	III	IV	I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,62	3,35	3,27	2,78	3,41
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,73	2,55	-8,14	-9,75	1,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,62	-2,29	-1,19	2,08	6,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,46	1,59	-2,10	-0,69	0,38
5. Perubahan Inventori	-99,71	-99,29	-9,64	-155,57	332,29
6. Ekspor Luar Negeri	-26,35	1,19	-41,66	-78,53	-30,71
7. Impor Luar Negeri	128,80	7,42	61,32	-5,49	2,40
8. Net Ekspor Antar Daerah	-2,83	10,27	8,91	-4,30	23,81
P D R B	2,16	0,04	-2,02	-2,21	-0,38

Tabel 4.

Laju Pertumbuhan c-to-c PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	2014		2015		
	III	IV	I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,48	3,45	3,27	3,02	3,16
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	22,14	16,77	-8,14	-8,96	-5,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,87	3,01	-1,19	0,53	2,66
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,54	6,69	-2,10	-1,40	-0,80
5. Perubahan Inventori	-100,53	-96,44	-9,64	-97,28	24,21
6. Ekspor Luar Negeri	-34,69	-27,78	-41,66	-65,81	-54,54
7. Impor Luar Negeri	93,08	67,57	61,32	19,72	13,48
8. Net Ekspor Antar Daerah	4,72	7,11	8,91	1,60	10,10
PDRB	2,19	1,65	-2,02	-2,11	-1,53

Tabel 5.

Laju Pertumbuhan *q-to-q* PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	2014		2015		
	III	IV	I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,78	0,68	-0,33	0,63	2,41
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-10,21	1,49	-1,80	0,85	1,16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,29	34,78	-40,69	14,74	15,90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,24	1,24	-4,04	-0,01	3,34
5. Perubahan Inventori	-34,34	575,93	-86,46	-192,47	-610,77
6. Ekspor Luar Negeri	-27,77	15,13	-63,07	-30,09	133,08
7. Impor Luar Negeri	-9,56	-34,51	65,04	-3,30	-2,02
8. Net Ekspor Antar Daerah	12,14	108,68	-62,45	8,90	45,07
PDRB	1,15	-2,02	-2,96	1,68	3,05

Tabel 6.

Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (2010=100)

Komponen	2014		2015		
	III	IV	I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	124,71	126,82	127,90	128,23	129,70
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	117,06	124,30	125,41	125,60	127,12
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	147,77	148,23	147,21	150,14	154,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	118,67	119,56	120,97	122,13	123,29
5. Perubahan Inventori	113,19	118,54	120,13	123,12	125,97
6. Ekspor Luar Negeri	153,94	144,23	130,16	135,44	105,81
7. Impor Luar Negeri	132,50	148,83	145,84	145,68	154,14
8. Net Ekspor Antar Daerah	250,15	197,23	274,40	272,05	241,41
PDRB	115,42	115,44	116,12	117,11	117,44

Tabel 7.

Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	2014		2015		
	III	IV	I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,72	1,69	0,85	0,26	1,15
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,21	6,19	0,89	0,16	1,21
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,03	0,31	-0,69	1,99	2,58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,40	0,75	1,18	0,95	0,95
5. Perubahan Inventori	-3,72	4,73	1,35	2,49	2,32
6. Ekspor Luar Negeri	-13,08	-6,31	-9,75	4,06	-21,88
7. Impor Luar Negeri	0,52	12,33	-2,01	-0,11	5,81
8. Net Ekspor Antar Daerah	15,49	-21,16	39,13	-0,85	-11,26
PDRB	0,73	0,02	0,59	0,85	0,29

Tabel 8.**Distribusi Persentase Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**

Komponen	2014		2015		
	III	IV	I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,91	61,54	63,37	62,35	62,50
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,71	1,89	1,91	1,89	1,87
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	25,69	35,45	21,39	24,41	28,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,10	34,45	34,27	33,74	34,06
5. Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ekspor Luar Negeri	5,11	5,63	1,92	1,36	2,40
7. Impor Luar Negeri	2,40	1,80	2,99	2,81	2,82
8. Net Ekspor Antar Daerah	-22,13	-37,15	-19,88	-20,94	-26,08
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 9.

PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010, Laju Pertumbuhan dan Distribusi Regional Sumatera

Provinsi Regional Sumatera	PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	Laju Pertumbuhan y-on-y	Laju Pertumbuhan c-to-c	Laju Pertumbuhan q-to-q	Distribusi PDRB ADHB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	33,81	28,79	-0,38	-1,53	3,05	5,03
Sumatera Utara	145,86	112,02	5,08	5,01	3,21	21,79
Sumatera Barat	48,44	35,66	4,71	5,16	3,05	7,21
Riau	167,42	114,23	-1,87	-1,50	4,68	24,92
Jambi	40,62	31,73	4,53	5,21	0,47	6,05
Sumatera Selatan	88,31	65,93	4,89	4,75	3,82	13,15
Bengkulu	12,77	9,59	5,17	5,26	2,01	1,90
Lampung	66,88	52,31	5,18	5,07	3,27	9,96
Kepulauan Bangka Belitung	15,45	11,58	3,96	4,01	1,08	2,30
Kepulauan Riau	52,15	39,28	5,72	6,37	1,92	7,76
SUMATERA	671,72	501,12	3,04	3,16	3,25	100

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://aceh.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh

Telp. (0651) 23005 Fax. (0651) 33632

<http://www.aceh.bps.go.id> Email: bps1100@bps.go.id